**RANCANGAN**

**PERATURAN OJK TENTANG**

**BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rancangan Peraturan** | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR … TAHUN …  TENTANG  BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, | PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR … TAHUN …  TENTANG  BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH |  |  |
| Menimbang: | 1. Umum |  |  |
| 1. bahwa diperlukan upaya mendorong perbaikan aspek kelembagaan, perluasan akses sumber permodalan, serta penguatan struktur dan ketahanan industri bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah melalui konsolidasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional; | Sebagai salah satu jenis bank, industri BPR dan BPRS memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah tidak hanya terhadap akses perkreditan atau pembiayaan namun juga layanan keuangan lain. Peran penting tersebut menjadikan posisi BPR dan BPRS begitu strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama usaha mikro dan kecil. |  |  |
| 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19A ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), dan Pasal 28A ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan sejumlah penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPRS. Selain penyesuaian nomenklatur yang menegaskan peran BPR dan BPRS, undang-undang juga membuka kesempatan bagi BPR dan BPRS untuk memperluas akses permodalan yang harus disertai dengan perbaikan transparansi melalui penawaran umum di bursa efek. |  |  |
| 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17A ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; | Selain melalui penawaran umum, penguatan permodalan juga perlu dilakukan melalui aksi korporasi berupa Penggabungan dan Peleburan serta Pengambilalihan yang dilakukan oleh PSP. Bagi BPR dan BPRS yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama, aksi Penggabungan dan Peleburan menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR dan BPRS yang lebih kuat.  Selain konsolidasi industri BPR dan BPRS, semangat efisiensi lembaga jasa keuangan juga diamanatkan oleh Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperkenankan LKM untuk melakukan aksi Penggabungan dengan BPR dan BPRS. |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah | Selain itu terdapat sejumlah penyesuaian aspek kelembagaan lain seperti jaringan kantor yang diharapkan mampu mengakomodasi arah pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS. Sehingga diperlukan pembaruan ketentuan kelembagaan serta Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilihan bagi industri BPR dan BPRS. |  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN |  |  |  |
| Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH |  |  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM |  |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. |  |  |  |
| 1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. |  |  |  |
| 1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. |  |  |  |
| 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |  |  |  |
| 1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |  |  |  |
| 1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. |  |  |  |
| 1. Kantor Pusat adalah kantor BPR atau BPRS yang menjadi induk dalam organisasi BPR atau BPRS sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha BPR atau BPRS, dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Kantor Wilayah adalah kantor BPR atau BPRS yang membantu Kantor Pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan BPR atau BPRS, serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor BPR atau BPRS di bawah organisasi Kantor Wilayah. |  |  |  |
| 1. Kantor Cabang adalah kantor BPR atau BPRS yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah BPR atau BPRS, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Kantor Kas adalah kantor BPR atau BPRS yang melakukan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat usaha yang jelas tempat Kantor Kas melakukan usahanya. |  |  |  |
| 1. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor atau layanan di bawah Kantor Cabang atau Kantor Kas yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan. |  |  |  |
| 1. Terminal Perbankan Elektronik adalah perangkat elektronik yang disediakan BPR atau BPRS untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BPR, BPRS, atau LKM untuk menggabungkan diri dengan BPR atau BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR, BPRS, atau LKM yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR atau BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR, BPRS, atau LKM yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. |  |  |  |
| 1. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih BPR atau BPRS untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BPR atau BPRS baru yang karena hukum memperoleh aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR atau BPRS yang meleburkan diri dan status badan hukum BPR atau BPRS yang meleburkan diri berakhir karena hukum. |  |  |  |
| 1. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BPR atau BPRS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BPR atau BPRS tersebut. |  |  |  |
| 1. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan pada BPR atau BPRS dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. |  |  |  |
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah |  |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung. |  |  |  |
| 1. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPR atau BPRS yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah |  |  |  |
| BAB II  PENDIRIAN BPR DAN BPRS |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Umum |  |  |  |
| Pasal 2 | Pasal 2 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS didirikan berdasarkan: | Ayat (1) |  |  |
| * 1. permohonan oleh calon PSP; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. perubahan izin usaha BUK menjadi BPR; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. perubahan izin usaha BUS menjadi BPRS; | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. perubahan izin usaha BUK menjadi BPRS; | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. perubahan izin usaha BPR menjadi BPRS; atau | Huruf e  Perubahan izin usaha BPR menjadi izin usaha BPRS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah; |  |  |
| * 1. perubahan izin usaha LKM menjadi BPR atau BPRS. | Huruf f  Perubahan izin usaha LKM menjadi izin usaha BPR atau BPRS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transformasi LKM menjadi BPR atau BPRS; |  |  |
| 1. BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari OJK. | Ayat (2)  Cukup jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS didirikan oleh: 2. warga negara Indonesia; dan/atau | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. badan hukum Indonesia. | Huruf b  Badan hukum Indonesia di antaranya Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan badan hukum lain yang dimiliki oleh swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan sebagai calon PSP, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan jangka waktu operasional badan hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Ayat (4)  Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain didasarkan pada faktor ekonomi dan sosiologis wilayah tertentu serta kelangsungan bisnis BPR atau BPRS. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |  |  |
| BPR berbentuk badan hukum:   * 1. perseroan terbatas; atau | Huruf a  Termasuk perseroan terbatas yaitu perusahaan perseroan daerah. |  |  |
| * 1. koperasi. | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 5 | Pasal 5 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat pernyataan untuk: | Ayat (1) |  |  |
| * 1. penambahan modal disetor dan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP; dan | Huruf a  Perubahan PSP termasuk:   1. Penggantian PSP; dan/atau 2. Penambahan PSP. |  |  |
| * 1. pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS bagi BPRS, | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan muatan anggaran dasar pada saat RUPS yang dilaksanakan pertama kali setelah berlakunya Peraturan OJK ini. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 6 | Pasal 6 |  |  |
| 1. Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a paling sedikit: | Ayat (1)  Modal disetor bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian. |  |  |
| * 1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1; |  |  |  |
| * 1. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2; dan |  |  |  |
| * 1. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3. |  |  |  |
| 1. Modal disetor pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a paling sedikit: | Ayat (2)  Modal disetor bagi BPRS berbentuk badan hukum Koperasi yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian. |  |  |
| * 1. Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 1; |  |  |  |
| * 1. Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 2; dan |  |  |  |
| * 1. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan jumlah modal disetor pendirian BPR dan BPRS yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). | Ayat (3)  Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan, antara lain:   * 1. perkembangan perekonomian daerah yang berbeda dalam kelompok zona yang sama;   2. perubahan jumlah dan kinerja lembaga jasa keuangan;   3. kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPR dan BPRS ke depan yang berdampak pada perubahan kebutuhan biaya operasional; dan/atau   4. penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. |  |  |
| 1. Modal disetor pendirian BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen). | Ayat (4)  Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah seluruh aset lancar antara lain kas, kredit yang diberikan, penempatan dana antarbank, dan surat berharga, namun tidak termasuk biaya pendirian dan praoperasional BPR dan BPRS. Pemenuhan persentase penggunaan modal kerja sebesar 50% (lima puluh persen) ditujukan pada awal pendirian BPR dan BPRS. |  |  |
| 1. Pembagian zona pendirian BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan di wilayah provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Ayat (5)  Zona 1 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling tinggi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling ketat, sedangkan zona 3 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling rendah dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling longgar. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 7 | Pasal 7 |  |  |
| 1. Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum dan/atau unit usaha syariah di Indonesia atau BPR dan BPRS lain atas nama “Dewan Komisioner OJK q.q. nama calon pemegang saham dan/atau PSP BPR atau BPRS” dengan keterangan untuk pendirian BPR atau BPRS dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan OJK. | Ayat (1)  Bilyet deposito yang tidak dapat memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan persetujuan pencairan deposito, dilengkapi dengan surat terpisah yang memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan tujuan pencairan deposito yang ditandatangani oleh pejabat bank umum, BPR, atau BPRS lain yang berwenang di bank tempat deposito tersebut disetorkan. |  |  |
| 1. Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR atau BPRS. | Ayat (1)  Sebagai contoh:  Calon PSP yang akan mendirikan BPR pada zona 3 dengan persyaratan modal disetor Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR. |  |  |
| Bagian Kedua  Perizinan Pendirian BPR dan BPRS oleh Calon PSP |  |  |  |
| Pasal 8 | Pasal 8 |  |  |
| Pendirian BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. persetujuan prinsip; dan |  |  |  |
| 1. izin usaha. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 1  Persetujuan Prinsip |  |  |  |
| Pasal 9 | Pasal 9 |  |  |
| 1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang calon PSP kepada OJK disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Penyampaian kepada OJK ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan dengan tembusan kepada Kepala OJK Regional atau Kepala OJK sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPR atau BPRS akan didirikan. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada calon PSP untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan: | Ayat (3) |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan, meliputi: |  |  |  |
| * + 1. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan; |  |  |  |
| * + 1. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama; | Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |
| * + 1. wawancara bagi calon DPS; dan |  |  |  |
| * + 1. penelitian sumber dana setoran modal. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |  |  |
| 1. Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai BPR atau BPRS sebelum memperoleh izin usaha dari OJK. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip tidak mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK, persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2  Izin Usaha |  |  |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |  |  |
| 1. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diajukan kepada OJK disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR dan BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan, meliputi: |  |  |  |
| * + 1. penilaian kemampuan dan kepatutan serta wawancara, jika terdapat perubahan; dan |  |  |  |
| * + 1. penelitian kesiapan operasional. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 12 | Pasal 12 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah memperoleh izin usaha dari OJK harus melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung setelah tanggal izin usaha diterbitkan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan berupa penghimpunan dan/atau penyaluran dana. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS tidak melaksanakan kegiatan usaha dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha BPR dan BPRS yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. | Ayat (3)  Tidak melakukan kegiatan usaha termasuk BPR dan BPRS yang sudah melakukan kegiatan usaha namun:   1. tidak aktif melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan/atau penyaluran dana; dan 2. tidak memberikan layanan perbankan pada hari dan jam kerja operasional BPR dan BPRS.   Pemenuhan kriteria tidak aktif melakukan kegiatan usaha antara lain ditunjukkan pada laporan bulanan BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan OJK mengenai pelaporan BPR dan BPRS melalui sistem pelaporan OJK. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 13 | Pasal 13 |  |  |
| 1. BPR yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dapat mencantumkan kata “Bank” di depan nama BPR dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa “Bank Perekonomian Rakyat” atau disingkat “BPR”. | Ayat (1)  Kata “Bank” di depan nama BPR, bentuk badan hukum, dan frasa “Bank Perekonomian Rakyat” atau disingkat “BPR” dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito, dan warkat pembukuan.  Contoh:   1. Bank Cahaya Sejahtera Sentosa   PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Sejahtera Sentosa   1. Bank Cahaya   Koperasi BPR Cahaya Sejahtera Sentosa. |  |  |
| 1. BPRS yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dapat mencantumkan kata “Bank” di depan nama BPRS dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa atau kata “Bank Perekonomian Rakyat Syariah”, “BPR Syariah”, atau “BPRS”. | Ayat (2)  Contoh penulisan nama BPRS ABC:   1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah “ABC”; 2. BPR Syariah “ABC”; 3. BPRS “ABC”; 4. PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah “ABC”; 5. PT BPR Syariah “ABC”; atau 6. PT BPRS “ABC”. |  |  |
| Bagian Ketiga  Perubahan Izin Usaha BUK atau BUS Menjadi BPR atau BPRS |  |  |  |
| Pasal 14 | Pasal 14 |  |  |
| 1. Pendirian BPR atau BPRS yang berasal dari perubahan izin usaha BUK atau BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan berdasarkan: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. inisiatif dari BUK atau BUS; atau |  |  |  |
| * 1. keputusan OJK. |  |  |  |
| 1. Pendirian BPRS yang berasal dari perubahan izin usaha BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari BUK. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemberian izin usaha BPR dan BPRS yang berasal dari perubahan izin usaha BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pencabutan izin usaha BUK atau BUS oleh OJK. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pencabutan izin usaha BUK atau BUS dilakukan pada tanggal yang sama dengan pemberian izin usaha BPR atau BPRS. |  |  |
| 1. BUK atau BUS yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR atau BPRS dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPR atau BPRS diterbitkan. | Ayat (4)  Sebagai contoh:  BUK atau BUS yang memperoleh izin usaha sebagai BPR atau BPRS pada tanggal 2 Januari 2025 wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR atau BPRS paling lambat tanggal 1 Januari 2026.  Selama masa transisi, BPR hasil perubahan izin usaha mencantumkan nama BUK sebelum perubahan izin usaha setelah penulisan nama BPR.  Sebagai contoh:  PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Sejahtera Sentosa (d.h. PT Bank Cahaya Sejahtera Sentosa). |  |  |
| 1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan batas waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4). | Ayat (5)  Dalam menetapkan batas waktu yang berbeda, OJK mempertimbangkan antara lain tingkat kompleksitas dari proses penghentian bentuk dan kegiatan usaha BUK atau BUS yang tidak diperkenankan bagi BPR atau BPRS dan/atau penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor, serta laporan realisasi dari pelaksanaan rencana tindak yang disampaikan oleh BUK atau BUS kepada OJK. |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 1  Perubahan Izin Usaha Berdasarkan Inisiatif dari BUK atau BUS |  |  |  |
| Pasal 15 | Pasal 15 |  |  |
| 1. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (2) diajukan oleh BUK atau BUS kepada OJK disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini | Penyampaian kepada OJK ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengawasan Bank, Kepala OJK Regional, atau Kepala OJK sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BUK atau BUS. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUK atau BUS menjadi BPR atau BPRS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BUK atau BUS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: | Ayat (4) |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan | Huruf a  Cukup jelas |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan, meliputi: | Huruf b |  |  |
| * + 1. penilaian terhadap dokumen persiapan dan rencana tindak; | Angka 1 |  |  |
| * + 1. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris; dan | Angka 2  Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |
| * + 1. wawancara bagi calon DPS, jika terdapat perubahan. | Angka 3 |  |  |
| 1. Dalam hal BUK atau BUS memenuhi kelengkapan dan kesesuaian dokumen serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), OJK mencabut izin usaha BUK atau BUS dan memberikan izin usaha sebagai BPR atau BPRS. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 16 | Pasal 16 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS wajib merealisasikan rencana tindak yang telah disampaikan kepada OJK dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPR atau BPRS diterbitkan, berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. perubahan anggaran dasar; |  |  |  |
| * 1. penghentian kegiatan usaha BUK atau BUS yang tidak diperkenankan bagi BPR dan BPRS, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan |  |  |  |
| * 1. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK atau BUS yang tidak diperkenankan bagi BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh BUK atau BUS dan penilaian terhadap laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK berwenang menetapkan batas waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 17 | Pasal 17 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengubah anggaran dasar terkait penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari OJK. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS wajib menyampaikan kepada OJK: |  |  |  |
| * 1. perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |  |
| * 1. persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang, |  |  |  |
| paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang |  |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha sebagai BUK atau BUS dan pemberian izin usaha sebagai BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) berlaku sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 18 | Pasal 18 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS wajib mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal izin usaha sebagai BPR atau BPRS berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:    1. pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis; |  |  |  |
| * 1. media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS berada; dan |  |  |  |
| * 1. media daring melalui situs web dan/atau media sosial BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 19 | Pasal 19 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi: | Ayat (1) |  |  |
| * 1. simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi; | Huruf a  Termasuk simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi, antara lain:   1. transaksi giro; 2. rekening giro bank umum atau unit usaha syariah di Bank Indonesia; dan/atau 3. kepesertaan melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). |  |  |
| * 1. kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; | Huruf b  Termasuk kegiatan usaha dalam valuta asing mencakup:   1. penghimpunan dana; 2. penyaluran dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain; 3. *trade finance* seperti *letter of credit* dan bank garansi dalam valuta asing; dan/atau 4. treasury. |  |  |
| * 1. kepemilikan surat berharga, kecuali surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, atau pemerintah daerah; | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. transaksi pasar uang antar bank; dan | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPR dan BPRS. | Huruf e  Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPR atau BPRS” antara lain penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri, bank garansi, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain. |  |  |
| 1. Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS yang melakukan penyelesaian portofolio yang tersisa. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “melakukan penyelesaian portofolio BUS atau BUK yang tersisa” adalah:   1. tidak melakukan transaksi baru atau memberikan produk BUS atau BUK; 2. tidak melakukan kegiatan usaha sebagai BUS atau BUK; dan 3. menyelesaikan dan/atau mengalihkan hak dan kewajiban BUS atau BUK. |  |  |
| 1. Dalam melakukan penyelesaian portofolio BUK atau BUS yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dan BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS wajib menyelesaikan dan/atau mengalihkan hak dan kewajiban BUK atau BUS. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 20 | Pasal 20 |  |  |
| BPR dan BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS wajib menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor BUK atau BUS yang tidak diperkenankan bagi BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dengan melakukan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. penutupan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sesuai dengan jenis dan wilayah yang diperkenankan bagi BPR atau BPRS; dan |  |  |  |
| 1. penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pada jaringan kantor BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 21 | Pasal 21 |  |  |
| Pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha dan jaringan kantor BUK atau BUS menjadi BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 22 | Pasal 22 |  |  |
| BPR dan BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK atau BUS wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau Pasal 16 ayat (3). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2  Perubahan Izin Usaha BUK atau BUS Berdasarkan Keputusan OJK |  |  |  |
| Pasal 23 | Pasal 23 |  |  |
| 1. Perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam keputusan OJK yang diberitahukan kepada BUK atau BUS. | Ayat (1)  Salinan keputusan OJK ditembuskan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain:   1. Bank Indonesia; dan 2. Lembaga Penjamin Simpanan. |  |  |
| 1. Keputusan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah OJK mengenakan sanksi administratif dan penetapan kewajiban untuk menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan OJK mengenai konsolidasi bank umum dan/atau Peraturan OJK mengenai perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 24 | Pasal 24 |  |  |
| BUK atau BUS yang ditetapkan menjadi BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR atau BPRS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan OJK mengenai pencabutan izin usaha BUK atau BUS dan pemberian izin usaha sebagai BPR atau BPRS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 25 | Pasal 25 |  |  |
| Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap BUK atau BUS yang ditetapkan menjadi BPR atau BPRS berdasarkan keputusan OJK. | Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Keempat  Sanksi Administratif |  |  |  |
| Pasal 26 | Pasal 26 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), dan/atau Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * 1. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS; |  |  |  |
| * 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; |  |  |  |
| * 1. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS; dan/atau |  |  |  |
| * 1. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan/atau Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 27 | Pasal 27 |  |  |
| 1. BUK atau BUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BUK atau BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 28, BUK atau BUS dapat dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |  |
| * 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau |  |  |  |
| * 1. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), BUK atau BUS dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. |  |  |  |
| BAB III  KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Umum |  |  |  |
| Pasal 28 | Pasal 28 |  |  |
| Setiap BPR dan BPRS wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 29 | Pasal 29 |  |  |
| Pemilik BPR dan BPRS yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |  |
| 1. memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai kepengurusan, permodalan atau pendanaan, serta maksud dan tujuan pendirian badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 30 | Pasal 30 |  |  |
| 1. Kepemilikan BPR dan BPRS oleh badan hukum paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “modal sendiri bersih” bagi:   1. badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian; 2. badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian.   Penyertaan yang dilakukan oleh badan hukum pemilik BPR atau BPRS yaitu penanaman dana dalam bentuk saham atau bentuk lain yang membuktikan kepemilikan baik dalam rupiah maupun valuta asing pada suatu badan usaha untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Penyertaan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal. |  |  |
| 1. Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor untuk pendirian BPR atau BPRS atau pada saat badan hukum melakukan penambahan modal disetor pada BPR atau BPRS. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK berwenang meminta BPR atau BPRS untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum pemilik. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 31 | Pasal 31 |  |  |
| Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dan BPRS dilarang: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau |  |  |  |
| 1. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 32 | Pasal 32 |  |  |
| Pemilik BPR dan BPRS dilarang menarik kembali modal yang telah disetor. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 33 | Pasal 33 |  |  |
| 1. Pemilik BPR dan BPRS paling sedikit harus memenuhi persyaratan: | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “pemilik” adalah pemegang saham, PSP, dan pengendali terakhir dari PSP berbentuk badan hukum. |  |  |
| 1. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan | Huruf a  Yang dimaksud dengan “memiliki akhlak dan moral yang baik” antara lain ditunjukkan dengan:   1. sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; 2. tidak dikenai sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap; dan 3. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama sesuai Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |
| 1. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. | Huruf b  Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” termasuk seluruh ketentuan mengenai BPR atau BPRS dan bersedia menangani permasalahan keuangan BPR atau BPRS. |  |  |
| 1. Dalam hal OJK memperoleh informasi bahwa pemegang saham BPR tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau dalam Pasal 35, pemegang saham wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan OJK yang menetapkan pemegang saham tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham BPR. | Ayat (2)  Informasi terkait pemegang saham didapatkan oleh OJK dari berbagai sumber, antara lain:  a. penelitian atau pemeriksaan;  b. putusan pengadilan; dan/atau  c. sumber lain yang dapat diverifikasi kebenarannya. |  |  |
| 1. Dalam hal OJK memperoleh informasi bahwa pemegang saham BPRS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau dalam Pasal 35, pemegang saham wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan OJK yang menetapkan pemegang saham tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham BPRS. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemegang saham BPR dan BPRS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka: | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. tidak diakui kepemilikan sahamnya; dan |  |  |  |
| * 1. tidak diperhitungkan hak suaranya dalam kuorum RUPS, |  |  |  |
| sejak tanggal keputusan OJK. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pemegang saham BPR dan BPRS tidak mengalihkan kepemilikan saham sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), pembayaran dividen ditangguhkan sampai dengan pemegang saham BPR dan BPRS mengalihkan kepemilikan saham. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal pemilik BPR dan BPRS berbentuk badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pengurus dari badan hukum. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 34 | Pasal 34 |  |  |
| Dalam hal terdapat perubahan pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pengurus dari badan hukum pemilik BPR dan BPRS, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan. | Cukup jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 35 | Pasal 35 |  |  |
| Kepemilikan BPR dan BPRS oleh selain warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui transaksi pembelian saham di bursa efek Indonesia. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 36 | Pasal 36 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS dapat melakukan penawaran umum efek di bursa efek Indonesia, dalam bentuk: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. efek bersifat ekuitas; dan/atau |  |  |  |
| * 1. efek bersifat utang berupa obligasi atau sukuk. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang akan melakukan penawaran umum harus memenuhi persyaratan: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. rencana penawaran umum efek telah dicantumkan dalam rencana bisnis; | Huruf a  Pencantuman dalam rencana bisnis dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS. |  |  |
| * 1. modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penilaian tata kelola dengan predikat paling rendah peringkat 2 dalam 2 (dua) periode terakhir; | Huruf c  Penilaian tata kelola yang digunakan merupakan hasil penilaian OJK sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola yang berlaku bagi BPR dan BPRS. |  |  |
| * 1. penilaian profil risiko paling rendah peringkat 2 dalam 2 (dua) periode terakhir; dan | Huruf d  Penilaian peringkat risiko yang digunakan merupakan hasil penilaian OJK sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi BPR dan BPRS. |  |  |
| * 1. tingkat kesehatan paling rendah peringkat komposit 2 dalam 2 (dua) periode terakhir. | Huruf e  Penilaian tingkat kesehatan yang digunakan merupakan hasil penilaian OJK sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. |  |  |
| 1. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK ini, BPR dan BPRS yang melakukan penawaran umum efek wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. | Ayat (3)  Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal antara lain yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal, direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, komite nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik, sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik, keterbukaan informasi dan tata kelola emiten atau perusahaan publik. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 37 | Pasal 37 |  |  |
| BPR dan BPRS wajib mengadministrasikan dokumen terkait kepemilikan yang tercatat dalam anggaran dasar termasuk daftar pemegang saham atau buku daftar anggota beserta perubahannya. | Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Kedua  Penambahan Modal Disetor dan/atau Perubahan Kepemilikan Saham yang Mengakibatkan Perubahan PSP |  |  |  |
| Pasal 38 | Pasal 38 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang keduanya mengakibatkan perubahan PSP. |  |  |  |
| 1. BPR yang melakukan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia, BPR atau BPRS lain, atau BPR yang bersangkutan, kecuali yang bersumber dari dividen BPR yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. BPRS yang melakukan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito pada BUS atau unit usaha syariah di Indonesia, BPRS lain, atau BPRS yang bersangkutan, kecuali yang bersumber dari dividen BPRS yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPR dan BPRS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya berlaku bagi BPR dan BPRS yang berada dalam status pengawasan normal. |  |  |  |
| 1. Tata cara penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk: |  |  |  |
| * 1. deposito pada BUK, BUS, unit usaha syariah, BPR, atau BPRS lain dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner OJK q.q. nama BPR atau BPRS”, dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK; dan/atau |  |  |  |
| * 1. deposito pada BPR atau BPRS yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner OJK q.q. nama calon PSP dan/atau PSP penyetor” dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. |  |  |  |
| 1. Dalam hal penambahan modal disetor atau perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya perubahan pengambilalihan, tata cara perubahan kepemilikan saham dilakukan melalui mekanisme pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 39 | Pasal 39 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang keduanya mengakibatkan perubahan PSP disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR dan BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: | Ayat (4) |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan | Huruf a |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan, meliputi: | Huruf b |  |  |
| * + 1. penelitian terhadap sumber setoran modal dan/atau sumber dana pengalihan saham; | Angka 1  Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP; dan | Angka 2  Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 40 | Pasal 40 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS harus menyelenggarakan RUPS persetujuan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2). |  |  |  |
| 1. Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan OJK menjadi tidak berlaku. |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS telah menyelenggarakan RUPS sebelum memperoleh persetujuan OJK, BPR dan BPRS dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK. |  |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan: |  |  |  |
| * 1. risalah RUPS; |  |  |  |
| * 1. data kepemilikan. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan: |  |  |  |
| * 1. salinan akta perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |  |
| * 1. surat persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang dilampiri dengan: |  |  |  |
| * 1. salinan akta perubahan kepemilikan saham; dan |  |  |  |
| * 1. surat penerimaan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada OJK untuk dicatat sebagai modal disetor. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan PSP |  |  |  |
| Pasal 41 | Pasal 41 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. |  |  |  |
| Bagian Keempat  Perubahan Modal Dasar |  |  |  |
| Pasal 42 | Pasal 42 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan modal dasar kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah BPR dan BPRS menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: |  |  |  |
| * 1. risalah RUPS yang dibuat dalam akta notariil; dan |  |  |  |
| * 1. persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
| Bagian Kelima  Sanksi Administratif |  |  |  |
| Pasal 43 | Pasal 43 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |  |
| * 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; |  |  |  |
| * 1. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS; dan/atau |  |  |  |
| * 1. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 40 ayat (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 40 ayat (7), Pasal 40 ayat (8), Pasal 41 ayat (1), dan/atau Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menyampaikan laporan. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 44 | Pasal 44 |  |  |
| Pihak Utama BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| BAB V  DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN PEJABAT EKSEKUTIF |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Anggota Direksi |  |  |  |
| Pasal 45 | Pasal 45 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK dapat menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola yang berlaku bagi BPR dan BPRS. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat atau di kabupaten/kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat. | Ayat (3)  Termasuk dalam wilayah satu provinsi adalah wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 46 | Pasal 46 |  |  |
| 1. Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. |  |  |  |
| 1. Dalam hal calon anggota Direksi BPRS yang diajukan merupakan Direksi: |  |  |  |
| 1. BPR yang melakukan perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS; atau |  |  |  |
| 1. BUS atau BUK yang melakukan perubahan izin usaha dari BUS atau BUK menjadi BPRS, |  |  |  |
| kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal izin perubahan kegiatan atau izin usaha menjadi BPRS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 47 | Pasal 47 |  |  |
| 1. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: | Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.  Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:   1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. suami/istri; 7. mertua; 8. besan; 9. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 10. kakek/nenek dari suami/istri; 11. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya. |  |  |
| * 1. sesama anggota Direksi; dan/atau |  |  |  |
| * 1. anggota Dewan Komisaris. |  |  |  |
| 1. Anggota Direksi baik secara sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan lain. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan lain, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau BPRS dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR atau BPRS sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “lembaga lain” antara lain partai politik atau organisasi kemasyarakatan. |  |  |
| 1. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Kedua  Anggota Dewan Komisaris |  |  |  |
| Pasal 48 | Pasal 48 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola yang berlaku bagi BPR dan BPRS. |  |  |  |
| 1. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat atau di kabupaten/kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 49 | Pasal 49 |  |  |
| 1. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sertifikat kompetensi kerja anggota Direksi dapat digunakan sebagai sertifikat kompetensi kerja bagi anggota Dewan Komisaris. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 50 | Pasal 50 |  |  |
| 1. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. |  |  |
| * 1. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau |  |  |  |
| * 1. anggota Direksi. |  |  |  |
| 1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lain. | Ayat (2)  Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) BPR atau BPRS. |  |  |
| 1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh OJK; atau |  |  |  |
| * 1. pada organisasi atau perusahaan atau badan usaha lain jika menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian OJK. |  |  |  |
| 1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51 | Pasal 51 |  |  |
| Dewan Komisaris BPRS wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi Prinsip Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Ketiga  Jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris |  |  |  |
| Pasal 52 | Pasal 52 |  |  |
| 1. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 53 | Pasal 53 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS harus menyelenggarakan RUPS pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan OJK menjadi tidak berlaku. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjabat sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “menjabat” adalah melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, antara lain mewakili BPR dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat BPR dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan BPR. |  |  |
| 1. Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan OJK, pada periode pelaporan tanggal pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 54 | Pasal 54 |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS telah menyelenggarakan RUPS sebelum memperoleh persetujuan OJK, BPR dan BPRS dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berlaku sebagai tanggal pertama kali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjabat. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “menjabat” adalah melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, antara lain mewakili BPR dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat BPR dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan BPR. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode pelaporan tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 55 | Pasal 55 |  |  |
| Dalam hal terdapat perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan jabatan secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode pelaporan tanggal perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, disertai dengan alasan perubahan jabatan dan dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan BPRS. | Perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yaitu perubahan jabatan yang tidak memenuhi kriteria pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 56 | Pasal 56 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode pelaporan tanggal: | Ayat (1)  Pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat terjadi sebelum atau sesuai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. |  |  |
| * 1. pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS; atau |  |  |  |
| * 1. berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPRS bagi RUPS yang tidak dapat diselenggarakan, |  |  |  |
| disertai dengan alasan pemberhentian, pengunduran diri, dan/atau risalah RUPS. |  |  |  |
| 1. Dalam hal anggota anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia, BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelaporan OJK, pada periode laporan tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, larangan berlaku sejak tanggal pemberitahuan atau keputusan OJK. | Ayat (3)  Larangan menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan  Komisaris antara lain disebabkan oleh:   1. pelanggaran ketentuan antara lain mengenai rangkap jabatan, hubungan keluarga atau semenda, dan persyaratan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja; atau 2. penetapan predikat tidak lulus sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia yang mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 48 ayat (1), ayat (2) atau jumlah yang ditetapkan dalam anggaran dasar, BPR dan BPRS wajib memenuhi jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 57 | Pasal 57 |  |  |
| 1. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS. |  |  |  |
| 1. Selain menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dan BPRS memberitahukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| Bagian Kelima  Dewan Pengawas Syariah |  |  |  |
| Pasal 58 | Pasal 58 |  |  |
| 1. BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPRS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota DPS. |  |  |  |
| 1. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. |  |  |  |
| 1. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), anggota DPS harus memenuhi Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola yang berlaku bagi BPRS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 59 | Pasal 59 |  |  |
| 1. Anggota DPS harus memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPRS wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan OJK sebelum menduduki jabatannya. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia. |  |  |
| 1. Pengangkatan anggota DPS oleh RUPS berlaku setelah mendapat persetujuan OJK. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling sedikit berdasarkan: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan |  |  |  |
| * 1. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS. |  |  |  |
| 1. Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan OJK, pada periode pelaporan pengangkatan anggota DPS yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 60 | Pasal 60 |  |  |
| 1. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS diputuskan oleh RUPS dan/atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPRS wajib menyampaikan laporan pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal: |  |  |  |
| * 1. pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS; atau |  |  |  |
| * 1. berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPRS bagi RUPS yang tidak dapat diselenggarakan, |  |  |  |
| disertai dengan alasan pemberhentian, pengunduran diri, dan/atau risalah RUPS. |  |  |  |
| 1. Dalam hal anggota DPS meninggal dunia, BPRS wajib menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelaporan OJK, pada periode laporan tanggal anggota DPS meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
| Bagian Keenam  Pejabat Eksekutif |  |  |  |
| Pasal 61 | Pasal 61 |  |  |
| 1. BPR wajib menyampaikan laporan pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode pelaporan tanggal pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif, disertai dengan dokumen pendukung. | Ayat (1)  Pejabat Eksekutif antara lain pemimpin Kantor Wilayah, pemimpin Kantor Cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.  Pejabat Eksekutif ang wajib dilaporkan adalah pejabat yang masuk dalam struktur organisasi BPR atau BPRS baik yang telah atau belum diangkat sebagai Pejabat Eksekutif namun telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif.  Termasuk dalam pengertian pemberhentian meliputi pengunduran diri Pejabat Eksekutif, pemberhentian oleh BPR atau BPRS, maupun pemberhentian sebagai akibat penetapan predikat tidak lulus oleh OJK. |  |  |
| 1. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau surat pemberhentian; dan |  |  |  |
| * 1. daftar riwayat hidup, salinan Kartu Tanda Penduduk, dan pas foto berwarna terkini. |  |  |  |
| 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan dalam laporan pemberhentian Pejabat Eksekutif. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 62 | Pasal 62 |  |  |
| 1. OJK melakukan penelitian terhadap laporan mengenai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. | Cukup jelas.  Ayat (1)  Penelitian meliputi pencarian informasi terhadap Pejabat Eksekutif antara lain:   1. termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan 2. memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet. |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan, BPR atau BPRS wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan OJK. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif wajib menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Bagian  Sanksi Administratif |  |  |  |
| Pasal 63 | Pasal 63 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51, Pasal 56 ayat (4), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51, Pasal 61 ayat (1) BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 56 ayat (4), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:    1. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS;    2. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor;    3. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS; dan/atau    4. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (6), Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan BPR dan BPRS melalui sistem pelaporan OJK. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 64 | Pasal 64 |  |  |
| Dalam hal anggota atau calon anggota Direksi, anggota atau calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), dan/atau Pasal 62 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan | Cukup jelas |  |  |
| BAB  JARINGAN KANTOR BPR DAN BPRS |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Umum |  |  |  |
| Pasal 65 | Pasal 65 |  |  |
| 1. Jaringan kantor BPR dan BPRS terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Sentra Keuangan Khusus. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjalankan kegiatan layanan dan operasional secara langsung kepada nasabah. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik untuk memperluas layanan kepada masyarakat. | Ayat (3)  Terminal Perbankan Elektronik merupakan alat atau mesin elektronik antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), atau *Electronic Data Capture* (EDC). |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menetapkan kantor atau unit organisasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola atas Terminal Perbankan Elektronik yang disediakan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 66 | Pasal 66 |  |  |
| BPR dan BPRS hanya dapat melakukan pembukaan jaringan kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi Kantor Pusat, sepanjang memenuhi modal inti minimum BPR atau BPRS. | Pembukaan jaringan kantor adalah pembukaan kantor BPR dan BPRS termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor.  Pemenuhan persyaratan modal inti minimum BPR dan BPRS dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum yang berlaku bagi BPR dan BPRS. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 67 | Pasal 67 |  |  |
| 1. Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan jaringan kantor BPR dan BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan jaringan kantor BPR dan BPRS berada dalam wilayah provinsi yang berbeda dengan lokasi Kantor Pusat, jaringan kantor BPR atau BPRS tetap dapat beroperasi di wilayah semula. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 68 | Pasal 68 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS harus menetapkan hari dan jam kerja operasional jaringan kantor BPR atau BPRS. | Ayat (1)  Hari dan jam kerja operasional adalah hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh BPR atau BPRS untuk melakukan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. |  |  |
| 1. Kantor BPR atau BPRS dapat melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional. | Ayat (2)  Hari libur nasional adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan rencana BPR atau BPRS dan/atau sebagian kantor BPR atau BPRS untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan/atau pada hari libur nasional kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, serta pada hari libur nasional berdasarkan keputusan pemerintah yang menyebabkan tidak terpenuhinya batas waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional dimaksud kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan operasional. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Kedua  Pembukaan Jaringan Kantor |  |  |  |
| Pasal 69 | Pasal 69 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib memperoleh izin OJK untuk melakukan pembukaan Kantor Wilayah. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang akan melakukan pembukaan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. rencana pembukaan Kantor Wilayah telah dicantumkan dalam rencana bisnis; | Huruf a  Pencantuman dalam rencana bisnis dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai rencana bisnis yang berlaku bagi BPR dan BPRS. |  |  |
| * 1. memenuhi kelengkapan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. dokumen yang menjelaskan cakupan wilayah kerja, tugas, dan kewenangan Kantor Wilayah; dan | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. tidak terdapat pelanggaran ketentuan; | Huruf d  Yang dimaksud “pelanggaran ketentuan” adalah BPR dan BPRS tidak sedang dikenai sanksi berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPRS. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 70 | Pasal 70 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Wilayah disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Wilayah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR atau BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 71 | Pasal 71 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS harus melaksanakan pembukaan Kantor Wilayah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal izin OJK. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Wilayah secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Wilayah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Wilayah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pembukaan Kantor Wilayah menjadi tidak berlaku. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sistem pelaporan OJK secara daring belum tersedia, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luring paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan Kantor Wilayah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 72 | Pasal 72 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib memperoleh izin OJK untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang akan melakukan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis; | Huruf a  Pencantuman dalam rencana bisnis dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai rencana bisnis yang berlaku bagi BPR dan BPRS. |  |  |
| * 1. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan usaha dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian; | Huruf b  Kondisi keuangan dan tingkat kesehatan antara lain tercermin pada rasio atau indikator keuangan utama yang terkait dengan permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas. |  |  |
| * 1. memiliki kesiapan operasional, termasuk kelengkapan struktur organisasi, standar operasional prosedur, serta infrastruktur dan teknologi informasi, | Huruf c  Teknologi informasi paling sedikit berupa aplikasi inti perbankan khususnya pada aspek keandalan jaringan dan keamanan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi yang berlaku bagi BPR dan BPRS. |  |  |
| * 1. tidak terdapat pelanggaran ketentuan; | Huruf d  Yang dimaksud “pelanggaran ketentuan” adalah BPR dan BPRS tidak sedang dikenai sanksi berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPRS. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 73 | Pasal 73 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR atau BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan, meliputi: |  |  |  |
| * + 1. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2); |  |  |  |
| * + 1. penilaian terhadap studi kelayakan pembukaan Kantor Cabang; dan |  |  |  |
| * + 1. analisis kesiapan operasional termasuk sarananya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 74 | Pasal 74 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS harus melaksanakan pembukaan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal izin OJK. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang. |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pembukaan Kantor Cabang menjadi tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 75 | Pasal 75 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS melakukan pembukaan Kantor Kas di wilayah kabupaten atau kota yang: | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “kantor induk” adalah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang menjadi induk Kantor Kas. |  |  |
| * 1. sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas; dan/atau |  |  |  |
| * 1. berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas terdekat. |  |  |  |
| 1. BPR dapat melakukan pembukaan Kantor Kas pada lokasi selain yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu, sepanjang berlokasi dalam batas wilayah pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2). | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain:   1. kemampuan rentang kendali; 2. perluasan akses keuangan bagi masyarakat; 3. upaya pemerataan pembangunan di daerah; dan 4. pengembangan kegiatan usaha kantor induk sehingga dapat berkembang dan beroperasi secara berkesinambungan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 76 | Pasal 76 |  |  |
| 1. Kantor Kas BPR atau BPRS melakukan kegiatan meliputi: | Ayat (1) |  |  |
| * 1. melayani nasabah penyimpan seperti pembukaan rekening simpanan, penerimaan setoran simpanan, penarikan tabungan, dan pencairan deposito; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. membantu pelayanan kegiatan perkreditan atau pembiayaan, seperti menerima permohonan kredit atau pembiayaan, melakukan pencairan kredit atau pembiayaan yang telah disetujui kantor induk, dan menerima angsuran kredit atau pembiayaan; | Huruf b  Penyediaan layanan kegiatan perkreditan atau pembiayaan tidak termasuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana atau pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah |  |  |
| * 1. menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan; | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. menyimpan uang kas sepanjang memiliki infrastruktur penyimpanan dan pengamanan yang memadai; dan/atau | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas, melalui mekanisme pelaporan kepada OJK. | Huruf e  Kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas antara lain berupa aktivitas dengan muatan dukungan teknologi untuk kegiatan pelayanan nasabah. |  |  |
| 1. Kantor Kas dilarang melakukan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 77 | Pasal 77 |  |  |
| BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 78 | Pasal 78 |  |  |
| 1. Sentra Keuangan Khusus melakukan salah 1 (satu) kegiatan utama: | Ayat (1) |  |  |
| * 1. layanan penghimpunan dana seperti penerimaan kas, pemrosesan penghimpunan dana, dan memberikan keputusan atas permohonan penghimpunan dana; atau | Huruf a  Sentra Keuangan Khusus yang melayani penghimpunan dana berbentuk konter fisik yang berlokasi secara tetap atau permanen. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Sentra Keuangan Khusus yang melayani penghimpunan dana dapat dibantu dengan kas keliling seperti kas mobil atau kas terapung. |  |  |
| * 1. layanan penyaluran dana seperti pemrosesan penyaluran dana dan memberikan keputusan atas permohonan penyaluran dana. | Huruf b  Sentra Keuangan Khusus yang melayani penyaluran dana berbentuk konter fisik yang berlokasi secara tetap atau permanen. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menjaga rentang kendali dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembukaan Sentra Keuangan Khusus. | Ayat (2)  BPR dan BPRS menetapkan kewenangan dan limit tertentu dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan atau penyaluran dana pada Sentra Keuangan Khusus. |  |  |
| 1. Sentra Keuangan Khusus dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor induk Sentra Keuangan Khusus. | Ayat (3)  Kantor induk bagi Sentra Keuangan Khusus yaitu Kantor Cabang dan/atau Kantor Pusat.  Sebagai contoh, PT BPR A memiliki Kantor Cabang yang berlokasi di Kabupaten X. PT BPR A dapat membuka kantor Sentra Keuangan Khusus di kecamatan pada Kabupaten X. |  |  |
| 1. Sentra Keuangan Khusus dilarang melakukan kegiatan usaha selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 79 | Pasal 79 |  |  |
| BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pembukaan Sentra Keuangan Khusus secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanan Sentra Keuangan Khusus. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 80 | Pasal 80 |  |  |
| BPR dan BPRS wajib menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas dan Sentra Keuangan Khusus dengan laporan keuangan Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada hari yang sama. | Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan terkait transaksi yang dilakukan oleh Kantor Kas dan Sentra Keuangan Khusus sesuai dengan Peraturan OJK ini. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 81 | Pasal 81 |  |  |
| BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penggunaan dan setiap penambahan Terminal Perbankan Elektronik yang dikelola oleh BPR atau BPRS secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanan penggunaan Terminal Perbankan Elektronik. | Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Ketiga  Pemindahan Alamat Jaringan Kantor |  |  |  |
| Pasal 82 | Pasal 82 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan pemindahan alamat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Cabang. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang akan melakukan pemindahan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. rencana pemindahan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis; | Huruf a  Pencantuman dalam rencana bisnis dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai rencana bisnis yang berlaku bagi BPR dan BPRS. |  |  |
| * 1. modal disetor pendirian BPR atau BPRS di zona Kantor Pusat yang baru, jika pemindahan alamat Kantor Pusat dilakukan ke zona yang lebih tinggi dari zona Kantor Pusat semula; dan | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. menyelesaikan atau mengalihkan tagihan dan kewajiban Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang. | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 83 | Pasal 83 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR atau BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen pengajuan permohonan. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan, meliputi: |  |  |  |
| * + 1. penilaian terhadap studi kelayakan pemindahan alamat kantor, jika pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPR atau BPRS; |  |  |  |
| * + 1. penilaian terhadap penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang; dan |  |  |  |
| * + 1. analisis bukti kesiapan operasional termasuk sarananya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 84 | Pasal 84 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS harus melaksanakan pemindahan alamat paling lambat: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. 30 (tiga puluh) hari kerja untuk pemindahan alamat Kantor Pusat; atau |  |  |  |
| * 1. 20 (dua puluh) hari kerja untuk pemindahan alamat Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang, |  |  |  |
| setelah tanggal persetujuan OJK. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Cabang. |  |  |  |
| 1. Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dan BPRS menyampaikan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai pemindahan alamat Kantor Pusat kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS tidak melaksanakan pemindahan alamat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan pemindahan alamat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Cabang menjadi tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 85 | Pasal 85 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib mengumumkan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR atau BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Kantor Kas secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 86 | Pasal 86 |  |  |
| BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan Sentra Keuangan Khusus dan lokasi Terminal Perbankan Elektronik secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanan pemindahan Sentra Keuangan Khusus dan lokasi Terminal Perbankan Elektronik. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 87 | Pasal 87 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS dapat melakukan pemindahan sementara alamat jaringan kantor dengan alasan keadaan kahar atau kondisi lain sesuai dengan kebutuhan BPR dan BPRS | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib: |  |  |  |
| * 1. mengumumkan informasi pemindahan sementara alamat kantor kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadi keadaan kahar; |  |  |  |
| * 1. menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahan sementara alamat jaringan kantor kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan pemindahan alamat jaringan kantor disertai dengan bukti pengumuman. |  |  |  |
| * 1. mengumumkan pemindahan kembali jaringan kantor ke lokasi semula kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pemindahan; dan |  |  |  |
| * 1. menyampaikan laporan pemindahan kembali Jaringan Kantor ke lokasi semula kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pemindahan disertai dengan bukti pengumuman. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman di kantor BPR dan BPRS dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR dan BPRS. |  |  |  |
| Bagian Keempat  Perubahan Status Jaringan Kantor |  |  |  |
| Pasal 88 | Pasal 88 |  |  |
| Perubahan status Jaringan Kantor BPR atau BPRS terdiri atas: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang; atau |  |  |  |
| 1. penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 89 | Pasal 89 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib memperoleh izin OJK untuk melakukan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan: |  |  |  |
| * 1. rencana perubahan status jaringan kantor telah dicantumkan dalam rencana bisnis; |  |  |  |
| * 1. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha; |  |  |  |
| * 1. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR atau BPRS; |  |  |  |
| * 1. memenuhi kelengkapan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur; dan |  |  |  |
| * 1. melengkapi infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 90 | Pasal 90 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan untuk memperoleh izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: | Ayat (4) |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan, meliputi: | Huruf b |  |  |
| * + 1. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) | Angka 1  Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. analisis pertimbangan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang; dan | Angka 2  Analisis dilakukan terhadap proyeksi keuangan Kantor Cabang dan strategi bisnis yang akan dilakukan. |  |  |
| * + 1. analisis bukti kesiapan operasional termasuk sarananya. | Angka 3  Dalam menganalisis bukti kesiapan operasional, OJK dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional Kantor Cabang. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 91 | Pasal 91 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang memperoleh izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang harus melaksanakan pembukaan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal izin dari OJK. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib mengumumkan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di kantor BPR dan BPRS yang statusnya meningkat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPR dan BPRS memperoleh izin dari OJK. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS tidak melaksanakan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang menjadi tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 92 | Pasal 92 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan rencana penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan penegasan atas permohonan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR atau BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan, meliputi: |  |  |  |
| * + 1. analisis penyelesaian atau pengalihan tagihan Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain; dan |  |  |  |
| * + 1. analisis bukti kesiapan operasional. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 93 | Pasal 93 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang memperoleh penegasan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas harus melakukan pembukaan Kantor Kas paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari OJK. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR wajib mengumumkan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di kantor BPR atau BPRS yang statusnya menurun paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPR dan BPRS memperoleh penegasan dari OJK. | Ayat (2)  Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas, disertai dengan bukti pengumuman. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS tidak melaksanakan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penegasan yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Kelima  Penutupan Jaringan Kantor |  |  |  |
| Pasal 94 | Pasal 94 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan penutupan Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang akan melakukan penutupan Kantor Cabang harus mencantumkan dalam rencana bisnis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 95 | Pasal 95 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan Kantor Cabang disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Ayat (1)  Penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor lain dari BPR tersebut atau pihak  lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.  Dokumen penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah berupa neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan.  Bukti penyelesaian dapat berupa bukti penjualan, pencairan, atau pengalihan aset dari Kantor Cabang yang ditutup |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR atau BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: | Ayat (4)  Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan penutupan Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang, OJK dapat melakukan pemeriksaan. |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan, meliputi analisis penyelesaian terhadap seluruh kewajiban dan penyelesaian terhadap seluruh aset. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 96 | Pasal 96 |  |  |
| 1. Izin operasional Kantor Cabang yang sebelumnya diberikan menjadi tidak berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1). | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. mengumumkan penutupan Kantor Cabang kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR dan BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja; dan | Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan penutupan Kantor Cabang antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR. |  |  |
| * 1. melaksanakan penutupan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja, |  |  |  |
| setelah tanggal persetujuan OJK. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Cabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 97 | Pasal 97 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Sentra Keuangan Khusus kepada masyarakat pada papan pengumuman di Kantor Kas atau lokasi Sentra Keuangan Khusus yang bersangkutan dan kantor induknya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan. | Ayat (1)  Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Sentra Keuangan Khusus antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR. Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Sentra Keuangan Khusus secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode laporan tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas, disertai dengan bukti pengumuman. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 98 | Pasal 98 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS dapat melakukan penutupan sementara jaringan kantor di luar hari libur resmi dengan alasan keadaan kahar atau kondisi lain sesuai dengan kebutuhan BPR dan BPRS. | Ayat (1)  Kondisi lain antara lain libur kedaerahan yang bersifat fakultatif, renovasi bangunan kantor, atau kegiatan kantor BPR yang mengharuskan penutupan sementara. |  |  |
| 1. Penutupan sementara kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim. | Ayat (2)  Yang dimaksud “tahun takwim” adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember). |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib: | Ayat (3) |  |  |
| * 1. mengumumkan informasi penutupan sementara kantor selain karena keadaan kahar kepada masyarakat; dan | Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan tanggal penutupan kantor sementara di luar hari libur resmi antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR. |  |  |
| * 1. menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor kepada OJK disertai bukti pengumuman, |  |  |  |
| paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara kantor. |  |  |  |
| 1. BPR wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektif kembali beroperasi. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Keenam  Sanksi Administratif |  |  |  |
| Pasal 99 | Pasal 99 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 78 ayat (4), Pasal 80, Pasal 82 ayat (1), Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 93 ayat (2), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 78 ayat (4), Pasal 80, Pasal 82 ayat (1), Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 93 ayat (2), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (3), BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * 1. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS; |  |  |  |
| * 1. penutupan jaringan kantor; dan/atau |  |  |  |
| * 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau pembukaan jaringan kantor. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), Pasal 68 ayat (4), Pasal 71 ayat (4), Pasal 85 ayat (1), Pasal 87 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 77, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86, Pasal 91 ayat (3), Pasal 93 ayat (3), Pasal 96 ayat (3), Pasal 97 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan BPR dan BPRS melalui sistem pelaporan OJK. |  |  |  |
| BAB VII  PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Perubahan Nama |  |  |  |
| Pasal 100 | Pasal 100 |  |  |
| 1. Perubahan nama BPR dan BPRS wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (1)  Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Undang-Undang mengenai perkoperasian. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang melakukan perubahan nama wajib mempersiapkan: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai dengan nama baru BPR; dan |  |  |  |
| * 1. persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat sesuai dengan nama baru BPR dan BPRS. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi yang berwenang wajib: | Ayat (3)  Cukup jelas |  |  |
| * 1. mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR atau BPRS, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan |  |  |  |
| * 1. menyampaikan permohonan penegasan penggunaan izin usaha BPR atau BPRS dengan nama baru kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 101 | Pasal 101 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan penegasan penggunaan izin usaha BPR atau BPRS dengan nama baru disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan penegasan penetapan penggunaan izin usaha BPR dan BPRS dengan nama baru paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR dan BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penegasan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan penegasan atas permohonan penetapan izin usaha BPR dan BPRS dengan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan. |  |  |  |
| Bagian Kedua  Perubahan Bentuk Badan Hukum |  |  |  |
| Pasal 102 | Pasal 102 |  |  |
| 1. Perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPRS wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (1)  Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Undang-Undang mengenai perkoperasian. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. persetujuan prinsip; dan |  |  |  |
| * 1. persetujuan pengalihan izin usaha. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 1  Persetujuan Prinsip |  |  |  |
| Pasal 103 | Pasal 103 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf a disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 104 | Pasal 104 |  |  |
| 1. Persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS tidak menyampaikan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2  Persetujuan Pengalihan Izin Usaha |  |  |  |
| Pasal 105 | Pasal 105 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf b disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini | Cukup jelas |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 106 | Pasal 106 |  |  |
| 1. Pembubaran badan hukum lama dilarang dilakukan sebelum: | Ayat (1) |  |  |
| * 1. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru telah dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d; dan | Huruf a  Pelaksanaan pengalihan seluruh hak dan kewajiban dibuktikan dengan akta notaris. |  |  |
| * 1. OJK memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2). | Huruf b  Cukup jelas |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, wajib: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. mengumumkan perubahan bentuk badan hukum BPR kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK; |  |  |  |
| * 1. mengganti penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai bentuk badan hukum baru BPR yang telah disetujui oleh OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK; |  |  |  |
| * 1. menggunakan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat dengan bentuk badan hukum baru untuk kegiatan operasional BPR paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK; |  |  |  |
| * 1. menyampaikan berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir atau warkat BPR dengan bentuk badan hukum lama yang belum digunakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK; dan |  |  |  |
| * 1. menyampaikan bukti pembubaran badan hukum lama kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah persetujuan dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, wajib menyampaikan bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman. | Ayat (3)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Tata cara pembubaran badan hukum lama dan pencabutan dari daftar perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Ketiga  Sanksi Administratif |  |  |  |
| Pasal 107 | Pasal 107 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), Pasal 100 ayat (2), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (1), Pasal 102 ayat (2), Pasal 106 ayat (1), Pasal 106 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), Pasal 100 ayat (2), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (1), Pasal 102 ayat (2), Pasal 106 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * 1. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| * 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan/atau Pasal 106 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan bukti pengumuman. |  |  |  |
| BAB VIII  PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Umum |  |  |  |
| Pasal 108 | Pasal 108 |  |  |
| 1. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR atau BPRS dapat dilakukan atas: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. inisiatif BPR atau BPRS; atau |  |  |  |
| * 1. perintah OJK. |  |  |  |
| 1. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari OJK. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 109 | Pasal 109 |  |  |
| 1. Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. BPR dengan BPR, menjadi BPR; |  |  |  |
| * 1. BPR dengan BPRS, menjadi BPRS; atau |  |  |  |
| * 1. BPRS dengan BPRS, menjadi BPRS. |  |  |  |
| 1. Selain Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggabungan juga dapat dilakukan antara: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. LKM dengan BPR, menjadi BPR; atau |  |  |  |
| * 1. LKM dengan BPRS, menjadi BPRS. |  |  |  |
| 1. Penggabungan antara LKM dengan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal LKM dan BPR atau BPRS menjalankan prinsip kegiatan usaha yang sama. | Ayat (3)  LKM yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional hanya dapat melakukan penggabungan dengan BPR dan LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat melakukan penggabungan dengan BPRS. |  |  |
| 1. BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin Penggabungan atau Peleburan berlaku. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan batas waktu penyelesaian hak dan kewajiban yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4). | Ayat (5)  Yang dimaksud “pertimbangan tertentu” antara lain keadaan kahar atau pertimbangan lain seperti sisa hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional yang masih harus diselesaikan tidak signifikan |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 110 | Pasal 110 |  |  |
| 1. Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara BPR dengan BPR, BPR dengan BPRS, atau BPRS dengan BPRS, yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama atau berbeda. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling luas berlokasi dalam 1 (satu) wilayah kepulauan utama. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Wilayah kepulauan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah provinsi yang masuk dalam teritorial pulau atau kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan jumlah dan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang lebih luas dari wilayah kepulauan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Ayat (4)  Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain hasil analisis terhadap studi kelayakan yang disusun oleh BPR dan BPRS meliputi kesiapan manajemen risiko dan infrastruktur teknologi informasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan dapat melakukan pembukaan, pemindahan, perubahan status, dan/atau penutupan jaringan kantor pada provinsi lokasi jaringan kantor BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 111 | Pasal 111 |  |  |
| 1. LKM yang akan melakukan Penggabungan dengan BPR atau BPRS harus memenuhi persyaratan: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. berlokasi dalam wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS penerima Penggabungan; dan |  |  |  |
| * 1. memiliki kinerja keuangan baik, paling sedikit: |  |  |  |
| * + 1. rasio pinjaman atau pembiayaan bermasalah paling tinggi 5% (lima persen) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; dan |  |  |  |
| * + 1. memperoleh laba pada tahun berjalan dan saldo kumulatif laba positif. |  |  |  |
| 1. Pemegang saham, pengurus, dan pegawai LKM yang akan menjadi: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Pihak utama pada BPR atau BPRS hasil Penggabungan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau |  |  |  |
| * 1. Pejabat Eksekutif harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan OJK ini. |  |  |  |
| Bagian Kedua  Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan atau Peleburan |  |  |  |
| Pasal 112 | Pasal 112 |  |  |
| 1. Direksi masing-masing BPR, BPRS, dan/atau LKM yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama menyusun rancangan Penggabungan atau Peleburan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing BPR, BPRS, dan/atau LKM. | Ayat (2)  Persetujuan Dewan Komisaris dapat ditandatangani oleh:   1. komisaris utama; atau 2. 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris yang mewakili BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 113 | Pasal 113 |  |  |
| 1. Direksi BPR, BPRS, dan/atau LKM yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan menyusun konsep akta Penggabungan atau Peleburan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Konsep akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi BPR, BPRS, dan/atau LKM berdasarkan rancangan Penggabungan atau Peleburan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 114 | Pasal 114 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan harus memenuhi persyaratan persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan yaitu: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. memenuhi modal inti sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS; |  |  |  |
| * 1. diproyeksikan memiliki predikat atau peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3 (PK-3); dan |  |  |  |
| * 1. calon pihak utama BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritasa Jasa Keuangan berwenang menetapkan persyaratan persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah dan/atau mengakselerasi kebijakan konsolidasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 115 |  |  |  |
| 1. Direksi BPR, BPRS, dan/atau LKM menyampaikan permohonan persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada OJK disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini | Ayat (1)  Penyampaian kepada OJK ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan dengan tembusan kepada Kepala OJK Regional atau Kepala OJK sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPR atau BPRS. |  |  |
| 1. OJK melakukan penelaahan atas permohonan persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR atau BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan, meliputi: |  |  |  |
| * + 1. penelitian kondisi keuangan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan, paling sedikit kewajiban pemenuhan modal minimum, pemenuhan modal inti minimum, dan tingkat kesehatan paling rendah peringkat komposit 3; |  |  |  |
| * + 1. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama serta wawancara bagi calon anggota DPS; |  |  |  |
| * + 1. penelitian administratif calon pemegang saham; |  |  |  |
| * + 1. penelitian setoran modal yang disetujui oleh RUPS, jika terdapat penambahan modal disetor; dan |  |  |  |
| * + 1. penelitian kesiapan teknologi informasi. |  |  |  |
| 1. OJK memberitahukan kepada BPR, BPRS, atau LKM bahwa penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan BPR, BPRS, atau LKM melanjutkan proses berupa: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. mengumumkan ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan; |  |  |  |
| * 1. menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh kreditur, jika ada; dan |  |  |  |
| * 1. menyelenggarakan RUPS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 116 | Pasal 116 |  |  |
| 1. Direksi BPR, BPRS, atau LKM yang melakukan Penggabungan atau Peleburan harus mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (5) huruf a yang paling sedikit memuat: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. nama dan tempat kedudukan BPR, BPRS, atau LKM yang melakukan Penggabungan atau Peleburan serta nama dan tempat kedudukan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; |  |  |  |
| * 1. rencana status jaringan kantor BPR, BPRS, atau LKM yang telah beroperasi sebelum Penggabungan atau Peleburan; dan |  |  |  |
| * 1. nama calon pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR dan BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan harus mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang berkepentingan melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar dan kepada pegawai masing-masing BPR, BPRS, atau LKM yang melakukan Penggabungan atau Peleburan melalui papan pengumuman di masing-masing kantor dan jaringan kantor BPR, BPRS, atau LKM paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. | Ayat (2)  Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain kreditur, masyarakat, dan mitra usaha lain dari BPR atau BPRS agar mengetahui rencana Penggabungan atau Peleburan dan mengajukan keberatan jika terdapat kepentingan yang dirugikan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 117 | Pasal 117 |  |  |
| 1. Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada BPR, BPRS, atau LKM atas rencana Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ringkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kreditur yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menyetujui Penggabungan atau Peleburan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan oleh Direksi sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS, keberatan harus disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh penyelesaian. |  |  |  |
| 1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati BPR atau BPRS dengan kreditur. |  |  |  |
| 1. Selama penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, Penggabungan atau Peleburan tidak dapat dilaksanakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 118 | Pasal 118 |  |  |
| 1. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan atau Peleburan hanya dapat menggunakan haknya untuk meminta kepada BPR, BPRS, atau LKM agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. | Ayat (1)  Harga yang wajar dapat didasarkan pada penilaian dari penilai independen. |  |  |
| 1. Penggunaan hak atas pembelian saham dengan harga yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 119 | Pasal 119 |  |  |
| 1. Rancangan Penggabungan atau Peleburan harus memperoleh persetujuan RUPS masing-masing BPR, BPRS, atau LKM yang melakukan Penggabungan atau Peleburan. | Ayat (1)  Persetujuan RUPS termasuk:   1. pengangkatan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang berlaku efektif setelah persetujuan OJK sebagaimana hasil penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c; dan 2. efektivitas penambahan modal disetor, apabila terdapat penambahan setoran modal. |  |  |
| 1. Dalam hal RUPS tidak menyetujui rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. proses Penggabungan atau Peleburan tidak dapat dilaksanakan; dan |  |  |  |
| * 1. OJK menyampaikan surat penghentian proses Penggabungan atau Peleburan. |  |  |  |
| 1. Rancangan Penggabungan atau Peleburan yang telah disetujui oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam akta Penggabungan atau Peleburan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan, perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembuatan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Akta Penggabungan atau Peleburan, akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan, atau akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) memuat pernyataan mengenai efektivitas berlakunya izin Penggabungan atau Peleburan. | Ayat (7)  Pernyataan mengenai efektivitas berlakunya izin Penggabungan atau Peleburan disesuaikan dengan batasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum dari BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 120 | Pasal 120 |  |  |
| 1. Direksi dari masing-masing BPR, BPRS, atau LKM yang melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama mengajukan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal akta Penggabungan atau Peleburan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR, BPRS, atau LKM tidak mengajukan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): |  |  |  |
| * 1. proses Penggabungan atau Peleburan tidak dapat dilaksanakan; dan |  |  |  |
| * 1. OJK menyampaikan surat penghentian proses Penggabungan atau Peleburan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 121 | Pasal 121 |  |  |
| 1. Direksi dari masing-masing BPR, BPRS, atau LKM menyampaikan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan izin Penggabungan atau Peleburan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR, BPRS, atau LKM untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan. |  |  |  |
| 1. OJK memberikan penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan, dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau persyaratan tidak terpenuhi. | Ayat (5)  Contoh penolakan atas permohonan Penggabungan atau Peleburan:  Perbedaan antara konsep akta Penggabungan atau Peleburan dan akta Penggabungan atau Peleburan yang dapat menyebabkan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan tidak dapat diproses, antara lain:   1. rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan; 2. rencana bisnis BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS; dan 3. nama calon PSP dan pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 122 | Pasal 122 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS hasil Penggabungan memberitahukan Penggabungan kepada instansi yang berwenang setelah memperoleh izin Penggabungan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR atau BPRS hasil Penggabungan harus mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar setelah memperoleh izin Penggabungan dari OJK dengan melampirkan salinan akta Penggabungan. |  |  |  |
| 1. Pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5). |  |  |  |
| 1. Direksi BPR atau BPRS hasil Peleburan harus mengajukan permohonan pengesahan badan hukum BPR atau BPRS hasil Peleburan kepada instansi yang berwenang setelah memperoleh izin Peleburan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan ditandatangani dengan melampirkan salinan akta Peleburan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 123 | Pasal 123 |  |  |
| Izin Penggabungan atau Peleburan bagi: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas: |  |  |  |
| * 1. Penggabungan berlaku sejak: |  |  |  |
| * + 1. tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang; |  |  |  |
| * + 1. tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Penggabungan; atau |  |  |  |
| * + 1. tanggal penerimaan surat perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Penggabungan; |  |  |  |
| * 1. Peleburan, berlaku sejak tanggal keputusan instansi yang berwenang mengenai pengesahan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan; |  |  |  |
| 1. BPR yang berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, berlaku sejak tanggal persetujuan OJK; atau |  |  |  |
| 1. BPR yang berbentuk badan hukum koperasi, berlaku sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar BPR hasil Penggabungan atau pengesahan akta pendirian BPR hasil Peleburan dari instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Peleburan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 124 | Pasal 124 |  |  |
| BPR atau BPRS yang telah memperoleh izin Penggabungan atau Peleburan wajib: |  |  |  |
| 1. menyusun laporan posisi keuangan penutupan masing-masing entitas yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; | Huruf a  Posisi neraca penutupan yaitu pada hari yang sama dengan berlakunya izin Penggabungan atau Peleburan |  |  |
| 1. menyusun laporan posisi keuangan pembukaan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; | Huruf b  Posisi neraca pembukaan yaitu 1 (satu) hari setelah posisi neraca penutupan. |  |  |
| 1. mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan disertai dengan laporan posisi keuangan pembukaan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui surat kabar dan papan pengumuman di kantor serta jaringan kantor BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan dan/atau situs web BPR atau BPRS; dan | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. menyampaikan laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman disertai dengan: | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. fotokopi akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan; |  |  |  |
| * 1. fotokopi persetujuan atau penerimaan pemberitahuan instansi yang berwenang terhadap BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan sebagaimana dimaksud pada angka 1); |  |  |  |
| * 1. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan |  |  |  |
| * 1. laporan pelaksanaan atas penyesuaian status seluruh jaringan kantor BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 5). |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Persyaratan dan Tata Cara Pengambilalihan |  |  |  |
| Pasal 125 | Pasal 125 |  |  |
| 1. Pengambilalihan BPR atau BPRS dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan cara Pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh BPR atau BPRS. | Ayat (1) |  |  |
| 1. Pihak yang melakukan Pengambilalihan harus menjaga kelangsungan usaha BPR atau BPRS. | Ayat (2)  Kelangsungan usaha BPR atau BPRS dilakukan antara lain dengan menjaga tingkat kesehatan BPR atau BPRS yang tidak boleh lebih rendah dari sebelum BPR atau BPRS diambil alih dan tidak melakukan pengalihan saham dalam jangka waktu tertentu. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 126 | Pasal 126 |  |  |
| 1. Pengambilalihan BPR atau BPRS yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian BPR atau BPRS dalam hal kepemilikan saham memenuhi kriteria: | Ayat (1) |  |  |
| * 1. menjadi pemegang saham dengan kepemilikan saham terbesar pada BPR atau BPRS; atau | Huruf a  Sebagai contoh, PT BPR W memiliki pemegang saham:  Tuan A: 30%  Tuan B: 50%  Tuan C: 20%  Tuan C membeli sebagian saham Tuan B sebesar 30% sehingga menjadi 50%. Pembelian saham tersebut termasuk Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian karena jumlah saham yang dimiliki Tuan C melebihi jumlah kepemilikan saham terbesar lain yang telahada, yaitu Tuan A (30%) sehingga komposisi akhir saham di PT BPR W menjadi sebagai berikut:  Tuan A: 30%  Tuan B: 20%  Tuan C: 50% |  |  |
| * 1. kepemilikan saham tidak melebihi pemegang saham terbesar namun menentukan baik langsung atau tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan BPR atau BPRS. | Huruf b  Sebagai contoh, PT BPRS X memiliki pemegang saham:  Tuan A: 60%  Tuan B: 20%  Tuan C: 20%  Tuan B membeli saham Tuan A sebesar 10% sehingga menjadi 30% dan Tuan A tetap menjadi pemegang saham terbesar. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa:   1. terdapat perjanjian antara Tuan A selaku pemegang saham mayoritas dengan Tuan B, atau dalam bentuk dokumen lain yang menunjukkan bahwa Tuan A memberikan hak suaranya kepada Tuan B; dan/atau 2. pengawas memiliki keyakinan yang didukung dengan bukti tertulis,   sehingga Tuan B memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis termasuk terkait kegiatan operasional PT BPRS X.  Pembelian saham tersebut termasuk Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian walaupun Tuan B tidak menjadi pemegang saham terbesar karena terbukti bahwa Tuan B menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan PT BPRS X. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat pihak yang melakukan pembelian Saham BPR atau BPRS menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) namun jumlah saham yang dibeli lebih kecil atau sama besar dengan jumlah saham yang dimiliki oleh PSP, terhadap pihak yang melakukan pembelian saham hanya dilakukan: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian sumber dana Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian BPR atau BPRS yang disebabkan oleh waris atau hibah tidak diperlakukan sebagai Pengambilalihan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian BPR atau BPRS yang disebabkan oleh waris atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh persetujuan OJK sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 127 | Pasal 127 |  |  |
| 1. Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih dan Direksi atau pengurus dari badan hukum yang melakukan Pengambilalihan masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan. | Ayat (1)  Pengurus antara lain pengurus untuk pihak yang melakukan  Pengambilalihan berbentuk badan hukum koperasi atau yayasan. |  |  |
| 1. Dalam hal pihak yang melakukan Pengambilalihan merupakan orang perseorangan, BPR atau BPRS yang diambil alih bersama dengan pihak yang melakukan Pengambilalihan menyusun rancangan Pengambilalihan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan BPR atau BPRS. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 128 | Pasal 128 |  |  |
| 1. Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih menyusun konsep akta Pengambilalihan. | Ayat (1)  Konsep akta Pengambilalihan dituangkan dalam format akta notariil. |  |  |
| 1. Konsep akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi BPR atau BPRS berdasarkan rancangan Pengambilalihan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 129 | Pasal 129 |  |  |
| 1. Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan menyampaikan permohonan persiapan pelaksanaan Pengambilalihan kepada OJK disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK melakukan penelaahan atas permohonan persiapan pelaksanaan Pengambilalihan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR atau BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. |  |  |  |
| 1. Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; |  |  |  |
| * 1. penelitian sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR atau BPRS; dan |  |  |  |
| * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak yang melakukan Pengambilalihan BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. OJK memberitahukan kepada BPR atau BPRS bahwa penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) telah dilakukan dan BPR atau BPRS melanjutkan proses berupa: |  |  |  |
| * 1. mengumumkan ringkasan atas rancangan Pengambilalihan; |  |  |  |
| * 1. menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh kreditur, jika ada; dan |  |  |  |
| * 1. menyelenggarakan RUPS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 130 | Pasal 130 |  |  |
| 1. Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih dan direksi atau pengurus dari badan hukum yang melakukan Pengambilalihan mengumumkan ringkasan rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5) huruf a yang paling sedikit memuat: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. nama dan tempat kedudukan BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan, disertai dengan identitas pihak yang melakukan Pengambilalihan; | Huruf a  Cukup jelas |  |  |
| * 1. komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah dilakukan Pengambilalihan; dan | Huruf b  Cukup jelas |  |  |
| * 1. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan. | Huruf c  Perkiraan jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak proses awal sampai dengan izin Pengambilalihan berlaku |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang diambil alih dan direksi atau pengurus dari badan hukum yang melakukan Pengambilalihan mengumumkan ringkasan atas rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang berkepentingan melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar dan kepada pegawai masing-masing BPR atau BPRS yang diambil alih dan pegawai dari badan hukum yang melakukan Pengambilalihan melalui papan pengumuman di masing-masing kantor dan jaringan kantor BPR atau BPRS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. | Ayat (2)  Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain kreditur dan mitra usaha lainnya dari BPR atau BPRS dan badan hukum yang akan melakukan Pengambilalihan agar mengetahui rencana Pengambilalihan dan mengajukan keberatan dalam hal terdapat kepentingan yang dirugikan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 131 | Pasal 131 |  |  |
| 1. Kreditur dapat mengajukan keberatan atas rencana Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ringkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2). | Cukup jelas |  |  |
| 1. Kreditur yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap menyetujui Pengambilalihan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan oleh Direksi sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapat penyelesaian. |  |  |  |
| 1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati dengan kreditur. |  |  |  |
| 1. Selama penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 132 | Pasal 132 |  |  |
| 1. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya untuk meminta kepada BPR atau BPRS agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penggunaan hak atas pembelian saham dengan harga yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pelaksanaan Pengambilalihan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 133 | Pasal 133 |  |  |
| 1. Rancangan Pengambilalihan dan konsep akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 harus memperoleh persetujuan: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. RUPS BPR atau BPRS yang diambil alih; dan |  |  |  |
| * 1. pihak yang melakukan Pengambilalihan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pihak yang melakukan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk badan hukum, rancangan Pengambilalihan dan konsep akta Pengambilalihan harus memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham atau yang setara. |  |  |  |
| 1. Dalam hal RUPS tidak menyetujui rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): |  |  |  |
| * 1. proses Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan; dan |  |  |  |
| * 1. OJK menyampaikan surat penghentian proses Pengambilalihan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 134 | Pasal 134 |  |  |
| 1. Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan secara bersama-sama menyampaikan permohonan izin Pengambilalihan disertai denan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Pengambilalihan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 135 | Pasal 135 |  |  |
| 1. Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui oleh OJK dituangkan dalam akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Pengambilalihan, perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. |  |  |  |
| 1. Perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 136 | Pasal 136 |  |  |
| Izin Pengambilalihan bagi: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sejak: |  |  |  |
| * 1. tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang; atau |  |  |  |
| * 1. tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Pengambilalihan; |  |  |  |
| 1. BPR yang berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah sejak tanggal persetujuan OJK; atau |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang berbentuk badan hukum koperasi sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Pengambilalihan dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 137 | Pasal 137 |  |  |
| BPR atau BPRS yang telah memperoleh izin Pengambilalihan wajib: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam surat kabar dan pada papan pengumuman di kantor serta jaringan kantor BPR atau BPRS hasil Pengambilalihan; dan |  |  |  |
| 1. menyampaikan laporan pelaksanaan Pengambilalihan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman disertai dengan: |  |  |  |
| * 1. fotokopi akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Pengambilalihan; |  |  |  |
| * 1. fotokopi akta Pengambilalihan; |  |  |  |
| * 1. fotokopi persetujuan atau penerimaan pemberitahuan instansi yang berwenang terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan |  |  |  |
| * 1. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a. |  |  |  |
| Bagian Keempat  Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan atas Perintah OJK |  |  |  |
| Pasal 138 | Pasal 138 |  |  |
| 1. OJK dapat memerintahkan BPR atau BPRS untuk melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan BPR atau BPRS lain, dan Pengambilalihan oleh pihak lain, bagi BPR atau BPRS yang: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. ditetapkan sebagai BPR atau BPRS dalam penyehatan; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. tidak dapat memenuhi modal inti minimum sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum yang berlaku bagi BPR atau BPRS; dan/atau | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. berdasarkan penilaian OJK, diperlukan upaya untuk memperkuat ketahanan dan daya saing BPR atau BPRS dalam mewujudkan industri BPR atau BPRS yang efisien. | Huruf c  Berdasarkan penilaian OJK, dalam hal BPR atau BPRS tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, antara lain mengenai tata kelola dan standar penyelenggaraan teknologi informasi. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS wajib melaksanakan perintah OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perintah tertulis. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 137 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan atas perintah OJK. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Kelima  Konsolidasi BPR dan BPRS |  |  |  |
| Pasal 139 | Pasal 139 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS dalam kepemilikan PSP yang sama yang berlokasi dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) wajib melakukan Penggabungan atau Peleburan. | Ayat (1)  Sebagai contoh, Tuan X merupakan PSP dengan komposisi kepemilikan saham pada:  PT BPR A di Provinsi Jawa Barat: 20% namun menurut penilaian OJK melakukan pengendalian terhadap PT BPR A;  PT BPR B di Provinsi Jawa Tengah: 65%; dan  PT BPR C di Provinsi Jawa Timur: 40%.  Tuan Y merupakan PSP dengan komposisi kepemilikan saham pada:  PT BPR C di Provinsi Jawa Timur: 60%; dan  PT BPR D di Provinsi Bali: 30%.  PT BPR A, PT BPR, dan PT BPR C melakukan Penggabungan dengan lokasi wilayah BPR hasil Penggabungan di Pulau Jawa berdasarkan hasil kesepakatan Tuan X dan Tuan Y secara bersama-sama dengan pemegang saham lain.  Penilaian kriteria PSP dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama bank. |  |  |
| 1. Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi BPR atau BPRS yang menjalankan prinsip kegiatan usaha yang berbeda. | Ayat (2)  Prinsip kegiatan usaha yang berbeda yaitu kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Meskipun BPR atau BPRS dalam kepemilikan PSP yang sama tidak diwajibkan untuk melakukan Penggabungan atau Peleburan, namun diperkenankan untuk menyampaikan permohonan Penggabungan atau Peleburan berdasarkan inisiatif BPR atau BPRS dengan hasil menjadi BPRS. |  |  |
| 1. OJK berwenang menetapkan jumlah BPR atau BPRS peserta Penggabungan atau Peleburan dan/atau wilayah BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang berbeda dari wilayah kepulauan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Ayat (3)  Kewenangan OJK dalam menetapkan jumlah dan wilayah yang berbeda tersebut dilakukan berdasarkan penelitian atas kesiapan dan kondisi keuangan BPR atau BPRS baik sebelum maupun proyeksi setelah hasil Penggabungan atau Peleburan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 140 | Pasal 140 |  |  |
| 1. Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPRS dalam kepemilikan PSP yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) wajib diselesaikan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2025. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bagi BPR atau BPRS milik pemerintah daerah, Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPRS dalam kepemilikan PSP yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) wajib diselesaikan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2026. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS dan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berbeda. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain penambahan jumlah BPR atau BPRS yang dimiliki oleh PSP dan BPR atau BPRS menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan faktor eksternal.  Sebagai contoh, Tuan Z merupakan PSP dengan komposisi kepemilikan saham pada:  PT BPRS A di Provinsi Banten: 65%  PT BPRS B di Provinsi Jawa Barat: 35%  PT BPRS C di Provinsi Jawa Tengah: 55%  Proses Penggabungan PT BPRS A, PT BPRS B, dan PT BPRS C memperoleh hasil persetujuan penelahaan persiapan pelaksanaan Penggabungan dari OJK pada bulan Juni 2025. Pada bulan Agustus 2025, Tuan Z melakukan Pengambilalihan terhadap PT BPRS D di Provinsi Jawa Timur. Proses Penggabungan PT BPRS A, PT BPRS B, dan PT BPRS C tetap diselesaikan sebelum batas waktu 31 Desember 2025. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 141 | Pasal 141 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS dalam kepemilikan PSP yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) wajib menyusun rencana tindak untuk melaksanakan Penggabungan atau Peleburan | Ayat (1)  Rencana tindak pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan memuat antara lain:   1. target waktu persiapan dan penyelesaian Penggabungan atau Peleburan; 2. struktur jaringan kantor BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 3. rencana kegiatan usaha dan model bisnis BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 4. kesiapan sumber daya manusia; 5. strategi dan cara penyelesaian hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan Penggabungan atau Peleburan; dan 6. upaya perbaikan kondisi keuangan termasuk penambahan modal disetor. |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini berlaku. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau lebih cepat sesuai permintaan OJK. | Ayat (3)  Laporan perkembangan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan antara lain memuat penyelesaian terhadap aspek yang telah dicantumkan dalam rencana tindak termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 142 | Pasal 142 |  |  |
| 1. PSP yang melakukan pembelian atau memperoleh saham pada BPR atau BPRS baru sehingga menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) BPR atau BPRS dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama sebelum 31 Desember 2025, wajib memenuhi ketentuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1). | Ayat (1)  Sebagai contoh, Tuan X merupakan PSP pada PT BPR A, PT BPR B, dan PT BPR C yang diwajibkan untuk melakukan Penggabungan terhadap ketiga BPR yang dimilikinya sebelum 31 Desember 2025. Dalam hal proses Penggabungan ketiga BPR dimaksud telah memperoleh hasil persetujuan penelahaan persiapan pelaksanaan Penggabungan sebelum 31 Desember 2025, namun Tuan X melakukan Pengambilalihan terhadap PT BPR D maka proses Penggabungan PT BPR A, PT BPR B, dan PT BPR C diselesaikan terlebih dahulu.  Dalam hal proses penggabungan PT BPR A, PT BPR B, dan PT BPR C belum memperoleh hasil persetujuan penelahaan persiapan pelaksanaan Penggabungan, PT BPR D diikutsertakan dalam proses Penggabungan tersebut. |  |  |
| 1. PSP yang melakukan pembelian atau memperoleh saham pada BPR atau BPRS lain sehingga menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) BPR atau BPRS dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama setelah 31 Desember 2025, wajib memenuhi ketentuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1). | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diselesaikan dalam batas waktu paling lambat 1 tahun setelah pembelian saham BPR atau BPRS lain dan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai PSP pada BPR atau BPRS lain. | Ayat (3)  Sebagai contoh, Tuan X merupakan PSP yang telah menyelesaikan Peleburan 2 (dua) BPR miliknya pada bulan September 2025 yang berlokasi di Sumatera Utara dan Riau dengan hasil PT BPR A di Sumatera Utara. Pada bulan September 2026, Tuan X melakukan Pengambilalihan PT BPR C di Sumatera Barat. Tuan X menyelesaikan Penggabungan PT BPR C ke dalam PT BPR A paling lambat September 2027. |  |  |
| Bagian Keenam  Kebijakan Mendorong Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan |  |  |  |
| Pasal 143 | Pasal 143 |  |  |
| BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan memperoleh: |  |  |  |
| * 1. perpanjangan jangka waktu penyelesaian rencana tindak pelampauan batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak rencana tindak disetujui oleh OJK; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. perpanjangan jangka waktu pemenuhan sertifikat kompetensi kerja tingkat yang lebih tinggi bagi anggota Direksi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jumlah aset memenuhi batas yang ditetapkan; | Huruf b  Sertifikat kompetensi kerja tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia BPR dan BPRS. |  |  |
| * 1. penyederhanaan penelitian administratif calon pemegang saham yang berasal dari BPR atau BPRS peserta Penggabungan atau Peleburan; dan/atau | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penundaan sementara atas pemenuhan ketentuan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR atau BPRS menjadi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya izin Penggabungan atau Peleburan. | Huruf d  Ketentuan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR atau BPRS antara lain pemenuhan komposisi komisaris independen, pembentukan satuan kerja, dan pembentukan komite. |  |  |
| Bagian Ketujuh  Sanksi Administratif |  |  |  |
| Pasal 144 | Pasal 144 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), Pasal 109 ayat (4), Pasal 112 ayat (2), Pasal 137, Pasal 138 ayat (2), Pasal 139 ayat (1), Pasal 140 ayat (1), Pasal 140 ayat (2), Pasal 141, Pasal 142 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), Pasal 109 ayat (4), Pasal 112 ayat (2), Pasal 137, Pasal 138 ayat (2), Pasal 139 ayat (1), Pasal 140 ayat (1), Pasal 140 ayat (2), Pasal 141, Pasal 142, BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |  |
| 1. penutupan jaringan kantor; |  |  |  |
| 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau |  |  |  |
| 1. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), Pasal 139 ayat (1), Pasal 140 ayat (1), Pasal 140 ayat (2), Pasal 141, Pasal 142, pihak utama BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau |  |  |  |
| 1. penundaan pembayaran dividen sampai dengan PSP melakukan Penggabungan atau Peleburan. |  |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan tanpa menunggu berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 141 ayat (2), Pasal 141 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menyampaikan laporan. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), BPR, BPRS, atau PSP dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (3). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 145 | Pasal 145 |  |  |
| OJK berwenang memberikan perintah tertulis untuk mendorong pelaksanaan konsolidasi BPR dan BPRS sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perintah tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| BAB IX  KEGIATAN USAHA BPRS |  |  |  |
| Pasal 146 | Pasal 146 |  |  |
| 1. BPR dapat melakukan perubahan izin usaha menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan izin OJK. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan izin usaha dari BPR menjadi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 147 | Pasal 147 |  |  |
| 1. Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPRS dapat menjalankan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (2)  Yang dimaksud menjalankan fungsi sosial antara lain melakukan penghimpunan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 148 | Pasal 148 |  |  |
| 1. BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1), BPRS dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * 1. penurunan tingkat kesehatan BPRS; |  |  |  |
| * 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; |  |  |  |
| * 1. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau |  |  |  |
| * 1. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham. |  |  |  |
| 1. BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1), pihak utama BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
| BAB X  SINERGI BPR DAN BPRS |  |  |  |
| Pasal 149 | Pasal 148 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS dapat melakukan sinergi perbankan. | Ayat (1)  Sinergi perbankan antara lain pemanfaatan infrastruktur berupa jaringan kantor, Terminal Perbankan Elektronik, pengarsipan dan sebagainya, pemanfaatan teknologi yaitu pusat data (*data center*), pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*), keamanan informasi, ketahanan siber, aplikasi dan sebagainya, layanan perbankan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah (*call center*), dukungan terkait sumber daya manusia, atau kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Sinergi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sinergi: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. BPR atau BPRS dengan BUS, BUK, BPR, dan/atau BPRS dalam kepemilikan PSP yang sama; atau |  |  |  |
| * 1. BPR atau BPRS dengan BUS atau BUK sebagai PSP. |  |  |  |
| 1. Dalam melaksanakan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis. | Ayat (3)  Kerja sama kedua belah pihak tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai tambah secara konsolidasi. |  |  |
| 1. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup: | Ayat (4) |  |  |
| * 1. pihak yang melakukan kerja sama; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. tujuan dan ruang lingkup kerja sama; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan | Huruf c  Jangka waktu perjanjian kerja sama mencantumkan dimulai dan berakhir periode kerja sama. Setiap pihak dapat memperpanjang jangka waktu kerja sama dengan melakukan penginian perjanjian kerja sama. |  |  |
| * 1. hak dan kewajiban setiap pihak paling sedikit mengenai: | Huruf d |  |  |
| * + 1. kewajiban kedua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi, termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah; | Angka 1  Kerahasiaan dan keamanan informasi (*non-disclosure agreement*), termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah yaitu tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi kedua belah pihak yang melaksanakan  sinergi, serta hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh nasabah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan  informasi nasabah antara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. |  |  |
| * + 1. tanggung jawab atas kerugian, dalam hal terjadi kegagalan sistem, kecurangan, dan/atau kegagalan dari faktor internal dan eksternal lain; | Angka 2  Cuku jelas. |  |  |
| * + 1. mitigasi risiko termasuk dalam hal terjadi penghentian kerja sama sebelum jatuh tempo; | Angka 3  Mitigasi risiko diperlukan sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan operasional dalam hal terjadi penghentian perjanjian kerja sama yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi antara lain peningkatan eksposur risiko sehubungan perubahan status pengawasan (menjadi pengawasan intensif  atau khusus), diambil alih, yang melibatkan sedikitnya salah satu pihak. |  |  |
| * + 1. penanganan pengaduan nasabah, dalam hal sinergi berhubungan dengan nasabah secara langsung; | Angka 4  Penanganan pengaduan nasabah sesuai dengan Peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. |  |  |
| * + 1. aspek alih pengetahuan, dalam hal sinergi melibatkan sumber daya manusia dari pihak yang melakukan sinergi; dan | Angka 5  Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi dari aktivitas atau ruang lingkup yang dilakukan kerjasama. | Angka 6  Termasuk dokumentasi antara lain bukti transaksi, termasuk untuk tujuan dan kepentingan audit. |  |  |
| 1. Perjanjian kerja sama disusun oleh kedua belah pihak disertai dengan dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa sinergi perbankan telah memenuhi aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4). | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sinergi perbankan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pihak yang menerima manfaat bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas keputusan bisnis, layanan, dan/atau operasional dari pelaksanaan sinergi perbankan. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kedua belah pihak wajib memastikan bahwa pelaksanaan sinergi perbankan sesuai dengan perjanjian kerja sama. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan sinergi terkait dengan penyediaan jasa teknologi informasi dikecualikan dari persetujuan OJK sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. | Ayat (9)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 150 | Pasal 150 |  |  |
| 1. Pelaksanaan sinergi perbankan BPRS wajib disertai dengan opini DPS. | Ayat (1)  Opini DPS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan sinergi  perbankan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Pihak yang bersinergi wajib menyampaikan kepada OJK: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. salinan perjanjian kerja sama; dan |  |  |  |
| * 1. opini DPS, bagi BPRS, |  |  |  |
| paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal perjanjian kerja sama. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan dari perjanjian kerja sama, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal perubahan perjanjian kerja sama disertai dengan salinan perubahan perjanjian kerja sama. | Ayat (3)  Perubahan perjanjian kerja sama yaitu perubahan atau perluasan dari jenis cakupan sebagaimana perjanjian kerja sama awal.  Sebagai contoh, dukungan kerja sama sebelumnya terkait dengan pusat layanan nasabah dan diubah menjadi layanan pemasaran melalui elektronik (*telemarketing*). |  |  |
| 1. Dalam hal akan terdapat penghentian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama selesai, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 151 | Pasal 151 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (8) dan/atau Pasal 150 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 149 ayat (8) dan/atau Pasal 150, BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |  |
| * 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; |  |  |  |
| * 1. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional; dan/atau |  |  |  |
| * 1. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 149 ayat (8) dan/atau Pasal 150, pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
| BAB XI  PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM |  |  |  |
| Pasal 152 | Pasal 152 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS dapat mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sepanjang berada dalam status pengawasan normal sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: 2. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan |  |  |  |
| 1. keputusan pencabutan izin usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 153 | Pasal 153 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan: | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan meliputi: |  |  |  |
| * + 1. analisis terhadap rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPR dan BPRS; dan |  |  |  |
| * + 1. analisis terhadap proyeksi arus kas serta jumlah kewajiban dan aset BPR dan BPRS. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan persyaratan jumlah dana *escrow* yang lebih tinggi dari jumlah dana *escrow* yang diajukan BPR dan BPRS. | Ayat (5)  Penetapan jumlah dana *escrow* yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan hasil analisis OJK atas proyeksi arus kas masuk aset BPR atau BPRS dengan total kewajiban, untuk memastikan penyelesaian kewajiban oleh BPR atau BPRS. |  |  |
| 1. Dalam hal jumlah aset lancar BPR atau BPRS lebih besar dari pada total seluruh kewajiban, pajak, dan kewajiban lainnya, BPR atau BPRS tidak diwajibkan untuk melakukan penempatan dana *escrow*. | Ayat (6)  Perhitungan seluruh kewajiban, pajak, dan kewajiban lain milik BPR atau BPRS dilakukan sampai dengan berakhirnya proses cabut izin usaha. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 154 | Pasal 154 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha wajib: | Ayat (1) |  |  |
| * 1. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPR dan BPRS, kecuali untuk penyelesaian kewajiban dan aset; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPR dan BPRS dan rencana penyelesaian kewajiban kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR dan BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR dan BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; | Huruf b  Cukup jelas |  |  |
| * 1. menyelesaikan seluruh kewajiban BPR dan BPRS dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan | Huruf c  Termasuk dalam penyelesaian seluruh kewajiban BPR antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang, dan biaya lain yang relevan. |  |  |
| * 1. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas laporan posisi keuangan akhir, termasuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPR. | Huruf d  Yang dimaksud dengan “kantor akuntan publik” adalah kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. BPR dan BPRS tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. BPR dan BPRS mengalami penurunan kondisi keuangan dan memenuhi kriteria BPR atau BPRS dalam penyehatan, |  |  |  |
| persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang telah diberikan menjadi batal dan tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 155 | Pasal 155 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan keputusan pencabutan izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf b setelah seluruh kewajiban BPR dan BPRS diselesaikan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan: |  |  |  |
| * 1. penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan |  |  |  |
| * 1. penelitian pemenuhan persyaratan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal dokumen permohonan dinilai telah lengkap dan memenuhi persyaratan, OJK: |  |  |  |
| * 1. menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha BPR dan BPRS; dan |  |  |  |
| * 1. memerintahkan BPR dan BPRS untuk melakukan pembubaran badan hukum dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Pemegang saham BPR dan BPRS tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR dan BPRS yang belum diselesaikan sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha diterbitkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 156 | Pasal 156 |  |  |
| Status badan hukum BPR dan BPRS berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhir atau bubarnya badan hukum BPR dan BPRS dalam Berita Negara Republik Indonesia. | Cukup jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 157 | Pasal 157 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * 1. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS; |  |  |  |
| * 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; |  |  |  |
| * 1. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS; dan/atau |  |  |  |
| * 1. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham. |  |  |  |
| BAB XII  KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |
| Pasal 158 | Pasal 158 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib melakukan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme perubahan nama sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini. | Ayat (2)  Tata cara dan mekanisme perubahan nama sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini berlaku bagi BPR atau BPRS yang belum ataupun telah melakukan perubahan nomenklatur sebelum Peraturan OJK ini berlaku. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 159 | Pasal 159 |  |  |
| 1. BPR yang berbentuk badan hukum selain Perseroan Terbatas atau Koperasi wajib melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Peraturan OJK ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme perubahan bentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 160 | Pasal 160 |  |  |
| BPR atau BPRS yang sampai berlakunya Peraturan OJK ini memiliki kegiatan pelayanan kas meliputi kas keliling dan titik pembayaran, dapat mencatatkan sebagai Sentra Keuangan Khusus | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 161 | Pasal 161 |  |  |
| Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan/atau klarifikasi pada saat penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi. | Yang dimaksud dengan “melalui sarana teknologi informasi” antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 162 | Pasal 162 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dan/atau Pasal 159 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dan/atau Pasal 159 ayat (1), BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| * 1. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS; |  |  |  |
| * 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau |  |  |  |
| * 1. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. |  |  |  |
| BAB XIII  KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
| Pasal 163 | Pasal 163 |  |  |
| BPR atau BPRS yang telah memiliki jaringan kantor pada kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR atau BPRS sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, tetap dapat mempertahankan jaringan kantornya. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 164 | Pasal 164 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang telah memperoleh: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. persetujuan prinsip pendirian BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a |  |  |  |
| * 1. persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf a; dan/atau |  |  |  |
| * 1. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a; |  |  |  |
| pada saat Peraturan OJK ini berlaku, tetap dapat mengacu pada Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang telah menyampaikan permohonan izin atau persetujuan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham, pembukaan jaringan kantor, pemindahan jaringan kantor, atau penutupan jaringan kantor, namun belum memperoleh persetujuan OJK, harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang telah memperoleh hasil penelaahan persiapan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan pada saat Peraturan OJK ini berlaku, tetap dapat mengacu pada Peraturan OJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 165 | Pasal 165 |  |  |
| Komposisi kepemilikan saham PSP pada BPR dan BPRS yang diwajibkan untuk melakukan Penggabungan dan Peleburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 ayat (1) pertama kali diperhitungkan dari komposisi kepemilikan PSP pada BPR dan BPRS di tanggal 31 Desember 2023. | Cukup jelas. |  |  |
| BAB IV  KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
| Pasal 166 | Pasal 166 |  |  |
| Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku:   1. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6383); | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602); |  |  |  |
| 1. Peraturan OJK Nomor 26/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 32/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23/OJK), |  |  |  |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 167 | Pasal 167 |  |  |
| Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari:   1. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6383); 2. Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602); 3. Peraturan OJK Nomor 26/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 32/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23/OJK),   dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 168 | Pasal 168 |  |  |
| Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |